

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH

DAN KEUANGAN DAERAH

Urgensi dari perencanaan pembangunan daerah, diantaranya berupa informasi mengenai kemampuan ekonomi daerah untuk membiayai rencana program dan kegiatan. Dengan adanya informasi tersebut, maka suatu daerah diharapkan dapat mengalokasikan anggaran secara efektif dan efisien. Kerangka ekonomi makro daerah dan Kerangka pendanaan dalam RKPD Semesta Berencana Tahun 2021 ini memberi gambaran tentang kondisi ekonomi makro Provinsi Bali sebagai bagian holistik dari perekonomian regional, nasional maupun global. Di samping itu, estimasi perkiraan sumber-sumber pendapatan dari sektor dan subsektor potensial merupakan dasar kebijakan dalam mengalokasikan anggaran secara efektif dan efisien.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah Provinsi Bali dituangkan dalam RPJMD Semesta Berencana Tahun 2018-2023. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

3.1.1. Strategi

Strategi adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya, maka strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam RPJMD Provinsi Bali 2018-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Provinsi Bali Tahun 2018-2023

**VISI: “NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI” MELALUI POLA
PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA**

MISI/TUJUAN	SASARAN RPJMD		STRATEGI	
MISI 1. MEMASTIKAN TERPENUHINYA KEBUTUHAN PANGAN, SANDANG, DAN PAPAN DALAM JUMLAH DAN KUALITAS YANG MEMADAI BAGI KEHIDUPAN KRAMA BALI				
T. Terpenuhinya kebutuhan dasar Krama Bali dengan kualitas yang layak	1	Meningkatnya Ketahanan pangan bagi Krama Bali	1	Peningkatan kualitas, distribusi dan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan
			2	Peningkatan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat
	2	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sandang masyarakat miskin	1	Membentuk yayasan terintegrasi "Yadnya Dharma Krama Bali" (atau sebutan lain yang lebih tepat) untuk penyediaan sandang terjangkau Krame Bali
			2	Peningkatkan pemenuhan kebutuhan sandang masyarakat masih menggunakan produk sandang Bali
	3	Meningkatnya rasio rumah tangga Krama Bali memiliki rumah layak huni	1	Mempermudah sistem investasi pembangunan rumah murah layak huni Krama Bali
			2	Memberdayakan Lembaga keuangan /perbankan membangun program kredit rumah terjangkau Krama Bali

MISI/TUJUAN	SASARAN RPJMD		STRATEGI	
	4	Terkendalnya Stabilitas Harga Pangan	1	Menguatkan kebijakan pengendalian stabilitas harga pangan
			2	Pengendalian harga pangan terjangkau oleh Krama Bali
MISI 2. MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN PANGAN, MENINGKATKAN NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING PERTANIAN, DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI				
T. Terwujudnya swasembada pangan Krama Bali dan daya saing pertanian	1	Meningkatnya diversifikasi dan optimalisasi potensi sumberdaya pangan lokal	1	Peningkatan produktivitas lahan pertanian tanaman pangan dalam arti luas, peternakan dan perikanan
			2	Sistem subak sebagai tulang punggung irigasi lahan pertanian sawah di Provinsi Bali
			3	Penyediaan bibit unggul pertanian tanaman pangan dalam arti luas, peternakan dan perikanan yang menjadi potensi pasar lokal dan ekspor
	2	Meningkatnya kualitas hasil pertanian Krama Bali	1	Pembangunan sistem Standar Kualitas Minimal (SKM) produk hasil pertanian tanaman pangan unggulan pasar lokal dan berorientasi ekspor
			2	Pembangunan sumber daya manusia unggul dibidang pertanian dan agro industri dalam arti luas
	3	Meningkatnya kapasitas SDM pertanian Krama Bali	1	Pemberdayaan petani menjadi produsen industri pangan olahan hasil pertanian

MISI/TUJUAN	SASARAN RPJMD		STRATEGI	
MISI 3. MENGEMBANGKAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT YANG TERJANGKAU, MERATA, ADIL DAN BERKUALITAS SERTA DIDUKUNG DENGAN PENGEMBANGAN SISTEM DAN DATA BASE RIWAYAT KESEHATAN KRAMA BALI BERBASIS KECAMATAN.				
T. Meningkatnya derajat kesehatan Krama Bali	1	Terjaminnya akses pelayanan kesehatan bagi seluruh Krama Bali	1	Pendataan riwayat dan pelayanan kesehatan Krama Bali
	2	Meningkatnya standar kualitas pelayanan kesehatan Krama Bali		
	3	Meningkatnya peserta dalam sistem jaminan kesehatan masyarakat	2	Pemberdayaan komunitas formal dan Informal Krama Bali sebagai mensosialisasikan dan sebagai peserta jaminan kesehatan Krama Bali Sejahtera (KBS)
MISI 4. MEMASTIKAN TERSEDIANYA PELAYANAN PENDIDIKAN YANG TERJANGKAU, MERATA, ADIL, DAN BERKUALITAS SERTA MELAKSANAKAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN				
T. Terwujudnya wajib belajar 12 tahun yang berkualitas	1	Meningkatnya pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas	1	Penyelenggaraan proses pelayanan pendidikan yang berkualitas
	2	Terwujudnya wajib belajar 12 tahun	2	Pendidikan gratis 12 tahun
MISI 5. MENGEMBANGKAN SISTEM PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH BERBASIS KEAGAMAAN HINDU DALAM BENTUK PASRAMAN DI DESA PEKRAMAN/DESA ADAT				
T. Terwujudnya karakter Krama Bali unggul sebagai individu dan sosial yang berbasis kearifan lokal	Meningkatnya pelayanan pendidikan berbasis Keagamaan pada tingkat sekolah dasar sampai dengan menengah dalam bentuk pasraman		Mendorong pemerintah pusat pendidikan berbasis Agama Hindu tingkat sekolah dasar dan Menengah masuk dalam sistem pendidikan Nasional	

MISI/TUJUAN		SASARAN RPJMD	STRATEGI
MISI 6. MENGEMBANGKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERDAYA SAING TINGGI YAITU BERKUALITAS DAN BERINTEGRITAS: BERMUTU, PROFESIONAL DAN BERMORAL SERTA MEMILIKI JATI DIRI YANG KOKOH YANG DIKEMBANGKAN BERDASARKAN NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL KRAMA BALI			
T. Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali yang unggul dan berdaya saing tinggi	Meningkatnya daya saing SDM Krama Bali		Peningkatan kapasitas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali sebagai Enterpreneur
MISI 7. MENGEMBANGKAN SISTEM JAMINAN SOSIAL SECARA KONPREHENSIF DAN TERINTEGRASI BAGI KEHIDUPAN KRAMA BALI SEJAK MULAI KELAHIRAN, TUMBUH DAN BERKEMBANG SAMPAI AKHIR MASA KEHIDUPANNYA			
T. Terwujudnya kesejahteraan sosial Krama Bali	Meningkatnya kualitas Pemenuhan kebutuhan hidup dasar yang layak Krama Bali		Pemerintah daerah bersama masyarakat mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki sebagai bagian dari jaminan sosial Krama Bali
MISI 8. MENGHASILKAN TENAGA KERJA YANG KOMPETEN, PRODUKTIF, BERKUALITAS DAN MEMILIKI DAYA SAING TINGGI SERTA MEMPERLUAS AKSES KESEMPATAN KERJA DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI			
T. Terwujudnya tenaga kerja yang berkompeten dan berdaya saing	1	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	Miningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali mengisi pasar tenaga kerja domestik dan global
	2	Meningkatnya akses bagi tenaga kerja di dalam dan diluar negeri	
MISI 9. MENGEMBANGKAN SISTEM JAMINAN SOSIAL DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA YANG KOMPERHENSIF, MUDAH DIJANGKAU, BERMUTU, DAN TERINTEGRASI BAGI KRAMA BALI YANG BEKERJA DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI			
T. Terwujudnya jaminan ketenagakerjaan yang terjangkau, bermutu dan berkelanjutan	Meningkatnya kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan		Peningkatan cakupan layanan jaminan kesehatan BPJS Kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenaga Kerjaan

MISI/TUJUAN	SASARAN RPJMD	STRATEGI	
MISI 10. MEMAJUKAN KEBUDAYAAN BALI MELALUI PENINGKATAN PELINDUNGAN, PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN NILAI-NILAI ADAT, AGAMA, TRADISI, SENI, DAN BUDAYA KRAMA BALI			
T. Terwujudnya Pemajuan Kebudayaan Bali	Terwujudnya pemajuan kebudayaan melalui peningkatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan Bali.	1	Melembagakan dan menginternalisasikan nilai nilai tradisi, seni, dan budaya melalui system pendidikan formal, non-formal dan informal
		2	Memelihara, merevitalisasi, dan mengembangkan tradisi, seni, sastra dan budaya masyarakat Bali
		3	Penguatan kedudukan, peran, fungsi, tugas dan wewenang Majelis Kebudayaan
		4	Konservasi dan restorasi peninggalan benda cagar budaya
MISI 11. MENGEMBANGKAN TATA KEHIDUPAN KRAMA BALI SECARA SAKALA DAN NISKALA BERDASARKAN NILAI-NILAI FILSAFAT SAD KERTIH YAITU ATMA KERTIH, DANU KERTIH, WANA KERTIH, SEGARA KERTIH, JANA KERTIH, DAN JAGAT KERTIH			
T. Terwujudnya tata kehidupan Krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi	Meningkatnya kualitas tata kehidupan Krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi	1	Merancang kegiatan untuk peningkatan infrastruktur di wilayah kawasan suci Pura
		2	Memperkuat kerukunan hidup antar umat beragama.

MISI/TUJUAN	SASARAN RPJMD		STRATEGI	
MISI 12. MEMPERKUAT KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DESA PAKRAMAN/DESA ADAT DAN SUBAK DALAM MENYELENGGARAKAN KEHIDUPAN KRAMA BALI YANG MELIPUTI PARAHYANGAN, PAWONGAN, DAN PALEMAHAN				
T. Terwujudnya Penguatan Desa Adat dalam menyelenggarakan kehidupan Krama Bali berdasarkan Sad Kerthi		Menguatnya kedudukan, tugas dan fungsi Desa Adat dan Subak		Penguatan kedudukan, tugas dan fungsi Desa Adat dan Subak
MISI 13. MENGEMBANGKAN DESTINASI DAN PRODUK PARIWISATA BARU BERBASIS BUDAYA DAN BERPIHAK KEPADA RAKYAT YANG TERINTEGRASI ANTAR KABUPATEN/KOTA SE-BALI				
T. Berkembangnya destinasi dan produk pariwisata budaya berbasis komunitas	1	Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata budaya berbasis komunitas	1	Event, atraksi, pertunjukan kesenian, pameran kesenian dan kegiatan adat dan budaya sebagai objek wisata
	2	Berkembangnya produk pariwisata kreatif dan inovatif berbasis budaya di kabupaten/kota Provinsi Bali	2	Kebudayaan kabupaten /kota yang beranekaragam Provinsi Bali sebagai produk pariwisata yang terintegrasi
MISI 14. MENINGKATKAN PROMOSI PARIWISATA BALI DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI SECARA BERSINERGI ANTAR KABUPATEN/KOTA SE-BALI DENGAN MENGEMBANGKAN INOVASI DAN KREATIFITAS BARU				
T. Meningkatnya pasar pariwisata Bali		Meningkatnya pasar pariwisata Bali di pasar domestik dan global		Mengkoordinasikan pelaku industri wisata melakukan bauran promosi (promotion mix) untuk meningkatkan pangsa pasar industri pariwisata Bali
MISI 15. MENINGKATKAN STANDAR KUALITAS PELAYANAN KEPARIWISATAAN SECARA KONPREHENSIF				
T. Meningkatnya kualitas pelayanan kepariwisataan	1	Meningkatnya tingkat kepuasan wisatawan	1	Penyediaan sarana prasarana yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) pariwisata pada setiap destinasi dan produk pariwisata
	2	Meningkatnya Kualitas SDM Pariwisata	1	Peningkatan kualitas SDM Pariwisata melalui pelatihan-pelatihan sesuai pasar kerja

MISI/TUJUAN	SASARAN RPJMD		STRATEGI	
			2	Memperkuat dukungan regulasi perlindungan tenaga kerja lokal dan mengembangkan kerjasama ketenagakerjaan di sektor pariwisata
MISI 16. MEMBANGUN DAN MENGEMBANGKAN PUSAT-PUSAT PEREKONOMIAN BARU SESUAI DENGAN POTENSI KABUPATEN/KOTA DI BALI DENGAN MEMBERDAYAKAN SUMBER DAYA LOKAL UNTUK MENDUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI DALAM ARTI LUAS				
T. Terwujudnya pemerataan pertumbuhan ekonomi Bali	1	Meningkatnya Investasi yang lebih merata di wilayah Bali	1	Mengembangkan Bali Timur dan Bali Utara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Provinsi Bali
	2	Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Lokal	1	Mengembangkan Pertokoan Modern berbasis ekonomi lokal
MISI 17. MEMBANGUN DAN MENGEMBANGKAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH BERBASIS BUDAYA (BRANDING BALI) UNTUK MEMPERKUAT PEREKONOMIAN KRAMA BALI				
T. Berkembangnya perekonomian berbasis budaya Bali	1	Meningkatnya kualitas produk IKM branding Bali berorientasi Ekspor	1	Mengenalkan, mempromosikan /mengkampanyekan seluruh produk Bali dengan bran Bali di pasar lokal dan ekspor
	2	Meningkatnya pusat-pusat perekonomian kecil dan menengah Krama Bali	2	Pengembangan usaha industri kecil dan menengah (IKM), Industri Rumah Tangga, usaha rumah tangga, usaha kecil dan menengah (UKM) dan Koperasi menghasilkan produk untuk meningkatkan pangsa pasar lokal dan ekspor

MISI/TUJUAN	SASARAN RPJMD		STRATEGI	
			3	Mengembangkan promosi dan pemasaran produk usaha industri kecil dan menengah (IKM), Industri Rumah Tangga, usaha rumah tangga, usaha kecil dan menengah (UKM) dan Koperasi untuk meningkatkan pangsa pasar lokal dan ekspor
MISI 18. MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR (DARAT, LAUT DAN UDARA) SECARA TERINTEGRASI SERTA KONEKTIVITAS ANTAR WILAYAH UNTUK Mendukung PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN SERTA AKSES DAN MUTU PELAYANAN PUBLIK DI BALI				
T. Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur darat, laut dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi mendukung pertumbuhan perekonomian baru	Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi	1	Pembangunan infrastruktur untuk mendukung kegiatan ekonomi Bali	
		2	Pembangunan Infrastuktur untuk meningkatkan pelayanan public	
MISI 19. MENGEMBANGKAN SISTEM KEAMANAN TERPADU YANG DITOPANG DENGAN SUMBER DAYA MANUSIA SERTA SARANA PRASARANA YANG MEMADAI UNTUK MENJAGA KEAMANAN DAERAH DAN KRAMA BALI SERTA KEAMANAN PARA WISATAWAN				
T. Terwujudnya stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Bali dan Wisatawan	1	Meningkatnya rasa aman dan nyaman Krama Bali dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya.	1	Pemberdayaan Krama Bali dan aparaturnya pemerintah daerah sebagai keamanan lingkungan pemukiman
			2	Peningkatan koordinasi antara aparaturnya pemerintah dan Lembaga kepolisian untuk menciptakan rasa aman wisatawan berwisata

MISI/TUJUAN	SASARAN RPJMD		STRATEGI	
MISI 20. MEWUJUDKAN KEHIDUPAN KRAMA BALI YANG DEMOKRATIS DAN BERKEADILAN DENGAN MEMPERKUAT BUDAYA HUKUM, BUDAYA POLITIK DAN KESETARAAN GENDER DENGAN MEMPERHATIKAN NILAI-NILAI BUDAYA BALI				
T. Terwujudnya tata kehidupan Krama Bali yang Madani sesuai dengan nilai-nilai Budaya Bali	Meningkatnya peran serta Krama Bali dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis		1	Memperkuat masyarakat Madani dalam sosial kemasyarakatan Krama Bali
			2	Kesetaraan Gender dalam nilai-nilai tata kehidupan Krama Bali
MISI 21. MENGEMBANGKAN TATA KEHIDUPAN KRAMA BALI, MENATA WILAYAH DAN LINGKUNGAN YANG BERSIH, HIJAU DAN INDAH				
T1. Terwujudnya Tata Kehidupan Krama Bali yang harmonis	Meningkatnya keharmonisan tata kehidupan Krama Bali berbasis wilayah dan lingkungan		1	Pemanfaatan ruang mengacu kepada tataruang yang harmonis dengan tata kehidupan Krama Bali
T2. Terwujudnya wilayah dan lingkungan hidup yang bersih, hijau dan indah	Terwujudnya ekosistem yang berkelanjutan		2	Membangun lingkungan yang sehat dan nyaman
MISI 22. MENGEMBANGKAN SISTEM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH YANG EFEKTIF EFISIEN, TERBUKA, TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN BERSIH SERTA MENINGKATKAN PELAYAN PUBLIK TERPADU YANG CEPAT, PASTI DAN MURAH				
T1. Meningkatkan kualitas pelayanan sektor publik	Meningkatnya kualitas pelayanan sektor publik		1	Membangun sarana prasarana pelayanan publik yang terintegrasi antar instansi lembaga pemerintah daerah
T2. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan	1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	1	Membangun sistem tata kelola yang terintegrasi
	2	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	1	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pengembangan sumber pendapatan lain-lain

3.1.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Arah kebijakan nantinya juga terkait dengan horizon waktu, sehingga menjadi jelas kapan arah kebijakan tersebut dilaksanakan. Arah Kebijakan Provinsi Bali Tahun 2018-2023 sebagai berikut.

Tabel 3.2
Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Provinsi Bali Tahun 2018-2023

Strategi		Arah Kebijakan
1	Peningkatan kualitas, distribusi dan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan	Ketersediaan hasil pertanian dalam arti luas, peternakan dan perikanan untuk memenuhi kebutuhan "Pangan Pokok Krama Bali"
2	Peningkatan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat	Meningkatkan keamanan dan konsumsi pangan bergizi
3	Pengendalian harga pangan terjangkau oleh Krama Bali	Stabilitas harga pangan Krama Bali
4	Membentuk yayasan terintegrasi "Yadnya Dharma Krama Bali" (atau sebutan lain yang lebih tepat) untuk penyediaan sandang terjangkau Krame Bali	"Yadnya Dharma Bali" (atau sebutan lain yang lebih tepat) menjadi jaringan pusat penyediaan sandang gratis atau murah dan layak pakai Krama Bali di kab/kota Provinsi Bali
5	Peningkatan pemenuhan kebutuhan sandang masyarakat miskin menggunakan produk sandang	Peningkatan pemenuhan kebutuhan sandang masyarakat miskin
6	Mempermudah sistem investasi pembangunan rumah murah layak huni Krama Bali	Meningkatkan kepemilikan rumah bagi rumah tangga Krama Bali
7	Memberdayakan Lembaga keuangan /perbankan membangun program kredit rumah terjangkau Krama Bali	Menjadikan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali, Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagai salah satu bank/sumber pendanaan bunga rendah untuk kredit rumah layak huni Krama Bali golongan ekonomi lemah (atau kelompok tertentu yang lebih tepat)

Strategi		Arah Kebijakan	
8	Peningkatan produktivitas lahan pertanian tanaman pangan dalam arti luas, peternakan dan perikanan	1	Pengenalan dan penerapan teknologi kepada petani pelaku usaha tanaman pangan dalam arti luas, perikanan dan peternakan untuk meningkatkan produksi
		2	Modernisasi sistem tanaman pertanian hortikultura untuk meningkatkan hasil tanam serta menghasilkan keluaran yang berkualitas dan bernilai tambah tinggi
9	Sistem subak sebagai tulang punggung irigasi lahan pertanian sawah Provinsi Bali	Pemberdayaan dan pembinaan komunitas/lembaga/organisasi Subak untuk memenuhi kebutuhan saluran irigasi untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian sawah kab/kota Provinsi Bali	
10	Penyediaan bibit unggul pertanian tanaman pangan dalam arti luas, peternakan dan perikanan yang menjadi potensi pasar lokal dan ekspor	1	Bekerjasama dengan lembaga riset pemerintah/swasta atau perguruan tinggi untuk menghasilkan bibit unggul sesuai dengan kebutuhan pasar lokal dan ekspor
		2	Pelindungan lahan pertanian pangan dalam arti luas, peternakan dan perikanan berkelanjutan
11	Pengembangan sistem Standar Kualitas Minimal (SKM) produk hasil pertanian tanaman pangan unggulan pasar lokal dan berorientasi ekspor	Pembinaan dan pengendalian petani untuk menghasilkan produk hasil pertaniannya sesuai dengan Standar Kualitas Minimal (SKM) untuk memenuhi kualitas pasar lokal dan ekspor	
12	Pembangunan sumber daya manusia unggul dibidang pertanian dan agro industri dalam arti luas	Pengembangan kompetensi Krama Bali dibidang pertanian tanaman pangan, agro industri, pascapanen sebagai duta pengembangan masyarakat pertanian yang unggul dan berkelanjutan	
13	Pemberdayaan petani menjadi produsen industri pangan olahan hasil pertanian	1	Meningkatkan kemampuan petani dengan mengenalkan industri pangan olahan hasil pertanian
		2	Membantu meningkatkan pangsa pasar lokal dan ekspor produk hasil pertanian dalam arti luas
		3	Menyediakan sumber pendanaan murah untuk pengembangan usaha tani

Strategi		Arah Kebijakan	
14	Pendataan riwayat dan pelayanan kesehatan Krama Bali	Mengembangkan sistem data base riwayat dan pelayanani kesehatan terintegrasi kabupaten/kota Provinsi Bali berbasis teknologi informasi Krama Bali	
15	Pemberdayaan komunitas formal dan Informal Krama Bali sebagai mensosialisasikan dan sebagai peserta jaminan kesehatan Krama Bali Sejahtera (KBS)	Membangun sistem data base peserta jaminan kesehatan (BPJS) Kesehatan Krama Bali pendataan Krama Bali terintegrasi riwayat dan pelayanani kesehatan terintegrasi kabupaten/kota Provinsi Bali berbasis teknologi informasi Krama Bali	
16	Menyelenggarakan proses pelayanan pendidikan yang berkualitas	1	Meningkatkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Provinsi Bali diatas Nasional
		2	Meningkatkan kemampuan dan kualitas tenaga pendidik
17	Pendidikan gratis 12 tahun	Memberikan beasiswa bagi kelompok keluarga Prasejahtera, Sejahtera-I dan Sejahtera -II untuk bersekolah di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja Provinsi Bali	
18	Mendorong pemerintah pusat pendidikan berbasis Agama Hindu tingkat sekolah dasar dan Menengah masuk dalam sistem pendidikan Nasional	Membangun sistem manajemen pendidikan berbasis Agama Hindu untuk diajukan ke pemerintah pusat	
19	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali sebagai Enterpreneur	1	Membangun sarana prasarana untuk menghasilkan tenaga kerja Krama Bali berjiwa wirausahawan
		2	Membangun hubungan kerjasama pemerintah dengan dunia usaha untuk menghasilkan wirausaha-2 baru Krama Bali
		3	Membangun hubungan kerjasama antara Government ToGovernment (G To G) dan pemerintah dengan swasta penempatan/ penyaluran dan perlindungan Tenaga Kerja Kerama Bali di luar negeri
20	Pemerintah daerah bersama masyarakat mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki sebagai bagian dari jaminan sosial Krama Bali	1	Mengembangkan Jaminan Sosial Kesehatan/ BPJS Kesehatan Provinsi Bali
		2	Memberdayakan sistem gotong royong sosial kemasyarakatan yang telah ada dan hidup pada Krama Bali

Strategi		Arah Kebijakan	
		3	Meningkatkan jaminan bantuan sosial kepada Krama Bali golongan keluarga miskin (Gakin)
21	Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali mengisi pasar tenaga kerja domestik dan global	Membangun sistem, sarana prasarana untuk menghasilkan tenaga kerja Krama Bali unggul dan meningkatkan kesempatan kerja	
22	Meningkatkan cakupan layanan jaminan kesehatan BPJS Kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenaga Kerjaan	1	Meningkatkan cakupan jaminan kesehatan tenaga kerja Krama Bali
		2	Membangun hubungan kerjasama antara Government To Government (G To G) dan pemerintah dengan swasta pengendalian jaminan sosial ketenagakerjaan Krama Bali bekerja diluar negeri
23	Melembagakan dan menginternalisasi nilai nilai tradisi, seni, dan budaya melalui system pendidikan formal, non-formal dan informal	Menjadikan tradisi, seni dan budaya sebagai tata cara kehidupan Krama Bali guna memperkokoh jati diri Krama Bali dan memperkuat integritas moral Krama Bali	
24	Memelihara, merevitalisasi, dan mengembangkan tradisi, seni, sastra dan budaya masyarakat Bali	Pengembangan tata kehidupan krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi	
25	Penguatan kedudukan, peran, fungsi, tugas dan wewenang Majelis Kebudayaan	Memberikan apresiasi dan fasilitasi kepada lembaga, pelaku, dan karya Seni, Sastra, dan Budaya	
26	Konservasi dan restorasi peninggalan benda cagar budaya	Melindungi peninggalan benda cagar budaya secara holistik	
27	Merancang kegiatan untuk peningkatan infrastruktur di wilayah kawasan suci Pura	1	Meningkatkan kualitas fasilitas keagamaan
		2	Memperhatikan kesejahteraan dan fasilitas kehidupan kepada para Sulinggih/Pemangku
		3	Meningkatkan sradha dan bhakti umat Hindu
		4	Pengamanan dan perlindungan terhadap Pura dan Pratima Pura
		5	Perlindungan terhadap aset Pura (Pelaba Pura) termasuk sertifikasi dengan Peraturan Bupati/Peraturan lainnya

Strategi		Arah Kebijakan	
		6	Melindungi simbol – simbol keagamaan yang sakral (Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota). (REGULASI) (Rancangan Pergub tentang simbol simbol keagamaan)
28	Memperkuat kerukunan hidup antar umat beragama	Meningkatkan toleransi hidup beragama	
29	Penguatan kedudukan, tugas dan fungsi desa adat dan subak	1	Memperkuat Desa Adat dalam melaksanakan fungsi Parahyangan, Palemahan, dan Pawongan, serta awig-awig dan pararem, sehingga Desa Adat akan berdiri kokoh dan bisa berjalan secara paralel dengan Desa
		2	Memberdayakan Desa Adat sebagai tempat Pendidikan berbasis keagamaan Hindu (khususnya pendidikan non-formal)
		3	Memberdayakan Desa Adat sebagai tempat Pelestarian dan pembinaan seni, budaya, dan kearifan lokal bagi Krama Bali termasuk sekehe teruna-teruni (generasi muda)
		4	Memberdayakan Desa Adat sebagai tempat Mengembangkan perekonomian rakyat (Pasar Adat, LPD, BUM Desa Adat, Toko Modern
		5	Memperkuat dan memberdayakan organisasi sekaha teruna dan pecalang di Desa Adat sampai ke tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi
		6	Memperkuat Desa Adat sebagai tempat Mengembangkan tata kehidupan Krama Bali sesuai nilai-nilai Sad Kerthi
		7	Menjadikan wantilan Desa Adat sebagai wahana Balinese Culture Meeting Point yang dilengkapi dengan Wifi gratis dan fasilitas pendukung seni budaya lainnya
		8	Memelihara, merevitalisasi dan memperkuat Hukum Adat/Awig/Perarem di Desa Adat
		9	Memberi perlindungan terhadap aset Desa (milik/Druwe Desa)

Strategi		Arah Kebijakan	
		10	Memelihara, merevitalisasi dan mengembangkan adat istiadat dan tradisi masyarakat Bali
30	Event, atraksi, pertunjukan kesenian, pameran kesenian dan kegiatan adat dan budaya sebagai objek wisata	Memberdayakan Event, atraksi, pertunjukan kesenian, pameran kesenian dan kegiatan adat dan budaya mempunyai nilai ekonomis	
31	Kebudayaan kabupaten /kota yang beranekaragam Provinsi Bali sebagai produk pariwisata yang terintegrasi	Pengembangan sarana prasarana budaya, adat istiadat sesuai dengan potensi daerah	
32	Mengkoordinasikan pelaku industri wisata melakukan bauran promosi (promotion mix) untuk meningkatkan pangsa pasar industri pariwisata Bali	Mempromosikan distinasisi wisata dan produk pariwisata baru provinsi Bali	
33	Penyediaan sarana prasarana yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) pariwisata pada setiap destinasi dan produk pariwisata	Pengendalian pelaku usaha industri pariwisata melalui pemenuhan Standar minimal (SPM) Pariwisata yang ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Bali	
34	Peningkatan kualitas SDM pariwisata melalui sesuai pasar kerja	1	Melakukan moratorium mengalihkan investasi dalam jumlah tertentu (atau size/jenis bisnis tertentu) ke Bali Timur dan Bali Utara
		2	Kemudahan perijinan usaha untuk investasi di Bali Timur dan Utara (size/jenis bisnis tertentu) ke Bali Timur dan Bali Utara
		3	Pengembangan sumberdaya daerah dengan pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta
35	Memperkuat dukungan regulasi perlindungan tenaga kerja lokal dan mengembangkan kerjasama ketenaga kerjaan disektor pariwisata	Membangun sarana prasarana untuk terbangunnya persepsi brand Bali untuk seluruh produk hasil produksi Provinsi Bali	

Strategi		Arah Kebijakan	
36	Pengembangan usaha industri kecil dan menengah (IKM), Industri Rumah Tangga, usaha rumah tangga, usaha kecil dan menengah (UKM) dan Koperasi menghasilkan produk untuk meningkatkan pangsa pasar lokal dan ekspor	1	Melakukan pembinaan dan pendampingan usaha industri kecil dan menengah (IKM), Industri Rumah Tangga, usaha rumah tangga, usaha kecil dan menengah (UKM) dan Koperasi menghasilkan produk yang unik dan berbasis budaya Bali yang berdaya saing tinggi
		2	Membangun sumber modal kerja mudah dan murah bagi pelaku usaha industri kecil dan menengah (IKM), Industri Rumah Tangga, usaha rumah tangga, usaha kecil dan menengah (UKM) dan Koperasi
		3	Membangun sarana prasarana spesifikasi khusus/ spesifik untuk meningkatkan daya saing usaha industri kecil dan menengah (IKM), Industri Rumah Tangga, usaha rumah tangga, usaha kecil dan menengah (UKM) dan Koperasi
37	Mengembangkan promosi dan pemasaran produk usaha industri kecil dan menengah (IKM), Industri Rumah Tangga, usaha rumah tangga, usaha kecil dan menengah (UKM) dan Koperasi untuk meningkatkan pangsa pasar lokal dan ekspor	Fasilitasi infrastruktur untuk pengembangan Koperasi, industri kecil menengah (IKM) dan Usaha Kecil Menengah (UKM)	
38	Pembangunan infrastruktur untuk mendukung kegiatan ekonomi Bali	Pembangunan infrastruktur darat , laut dan udara yang terinteragi dan konektivitas antara kabupaten /kota Provinsi Bali dengan wilayah lain di Indonesia	
39	Pembangunan Infrastuktur untuk meningkatkan pelayanan publik	Pembangunan infrastruktur untuk konektivitas antar kab/kota di Provinsi Bali	
40	Pemberdayaan Krama Bali dan aparatur pemerintah daerah sebagai keamanan lingkungan pemukiman	Meningkatkan sistem infrastruktur keamanan lingkungan Krama Bali	
41	Peningkatan koordinasi antara aparatur pemerintah dan Lembaga kepolisian untuk menciptakan rasa aman wisatawan berwisata	Meningkatkan sistem infrastruktur keamanan Wisatawan	

Strategi		Arah Kebijakan	
42	Memperkuat masyarakat Madani dalam sosial kemasyarakatan Krama Bali	Masyarakat Madani menjadi tulang punggung kehidupan demokratis, perlakuan hukum yang adil, dan dalam menjalankan hak-hak konstitusi kehidupan Krama Bali	
43	Kesetaraan Gender dalam nilai-nilai tata kehidupan Krama Bali	Menyelaraskan kesetaraan Gender dalam nilai-nilai budaya Bali dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di NKRI	
44	Pemanfaatan ruang mengacu kepada tataruang yang harmonis dengan tata kehidupan Krama Bali	1	Pembangunan infrastruktur, sarana prasarana untuk kehidupan Krama Bali dan pengembangan ekonomi daerah berprdoman pada tata ruang yang telah ditetapkan
		2	Menjadikan Wilayah Bali Timur dan Bali Utara Sebagai pusat pengembangan dan pertumbuhan ekonomi Baru
45	Membangun lingkungan yang sehat dan nyaman	Mengendalikan prilaku Krama Bali dan pengunjung untuk menjaga lingkungan hidup pulau Bali	
46	Membangun sarana prasarana pelayanan publik yang terintegrasi antar instansi Lembaga Pemerintah Daerah	Pelayanan publik terselenggara dengan cara-cara yang efisien, efektif dan transparan	
47	Membangun sistem tata kelola yang terintegrasi	1	Penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan kompetensinya
		2	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sumber daya pemerintah daerah

3.1.3. Prospek dan Tantangan Perekonomian Bali

Tantangan dan prospek perekonomian Bali, tentunya akan banyak dipengaruhi oleh tantangan dan prospek pada tataran global, nasional, maupun lingkungan Provinsi Bali sendiri.

Tantangan Global yang akan dihadapi dan harus diantisipasi dampak negatifnya oleh Pemerintah Provinsi Bali pada tahun 2020 ini adalah berupa:

1. Perang Dagang Amerika Serikat dengan Republik Rakyat Tiongkok
2. Penyebarluasan Virus COVID-19 atau yang lebih dikenal dengan Virus Corona
3. Perlambatan pertumbuhan ekonomi Republik Rakyat Tiongkok.

Tantangan global tersebut di atas harus diantisipasi oleh Pemerintah Provinsi Bali karena berdampak signifikan pada perekonomian Bali khususnya pada kabupaten/kota atau kawasan yang bergantung pada sektor pariwisata, industri, perkebunan, perikanan, dan perdagangan. Adapun dampak yang diterima oleh perekonomian Bali secara jangka pendek adalah berupa:

1. Menurunnya jumlah kunjungan wisatawan
2. Berkurangnya pasokan impor bahan baku industri
3. Menurunnya permintaan ekspor komoditas perikanan dan perkebunan
4. Menurunnya arus perdagangan
5. Meningkatnya inflasi

Sedangkan pada jangka panjang, tantangan global tersebut akan menimbulkan dampak berupa:

1. Berkurangnya kapasitas produksi
2. Menurunnya laju pertumbuhan ekonomi
3. Meningkatnya PHK dan angka pengangguran
4. Meningkatnya angka kemiskinan
5. Meningkatnya kredit macet

Guna meminimalisir dampak negatif yang mungkin terjadi bagi perekonomian, Pemerintah telah mengambil langkah-langkah strategis pada bidang fiskal yaitu:

1. Percepatan pencairan anggaran
2. Pindahkan kegiatan di daerah terkena dampak

Sasaran nasional yang harus dicapai pada akhir tahun 2021 sesuai dengan Rancangan RKP Tahun 2021 antara lain :

1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5,3-5,5% Inflasi secara nasional berkisar antara 2,0-4,0%.
2. Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 8,5-9,0%; IPM menjadi 72,50; gini rasio pada kisaran 0,375-0,380; dan tingkat pengangguran terbuka 4,8-5,1%.
3. Sasaran pemerataan pembangunan antar wilayah: kontribusi wilayah terhadap pembangunan nasional; Sumatera 4,62%, Jawa-Bali 5,74%, Kalimantan 4,08%, Sulawesi 6,68%, Nusa Tenggara 3,12 %, Maluku 6,88% Papua 7,18%.

Salah satu tantangan nasional (yang berasal dari permasalahan global) yang terjadi di tahun 2020 dan mempengaruhi perekonomian Provinsi Bali secara signifikan adalah pandemik COVID-19. Seluruh negara di dunia telah melaporkan kejadian COVID-19 di wilayahnya termasuk di Indonesia. Sejak dilaporkan kejadian pertama pada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia juga terus mempersiapkan diri terhadap ancaman pandemik. Tanggal 15 Maret pemerintah menerapkan pembatasan sosial (*physical distancing*), yang diikuti dengan pengetesan pada area yang paling rawan. Pemerintah Daerah juga telah menutup sekolah dan menganjurkan tempat usaha/kerja untuk membatasi kegiatan dan mendorong karyawannya agar bekerja dari rumah. Pemberlakuan tanggap darurat bencana kesehatan juga telah diaktifkan di berbagai daerah, termasuk Maklumat Kapolri tentang kepatuhan terhadap kebijakan penanganan virus corona tanggal 19 Maret 2020

Dalam lingkup nasional, permasalahan terkait aspek finansial akibat terjadinya pandemik COVID-19 ini antara lain:

1. Meningkatnya nilai tukar mata uang asing khususnya Dollar Amerika terhadap Rupiah.
2. Pertumbuhan ekonomi nasional mengalami tekanan pada kuartal-I tahun 2020 dimana hanya tumbuh 4,5%-4,9%.
3. Ketersediaan anggaran yang terbatas untuk penanganan COVID-19 dalam APBD TA 2020;
4. Ketersediaan bahan pangan dan kebutuhan pokok yang terganggu akibat *panic buying*;
5. Adanya kemungkinan PHK bagi industri yang tutup; dan
6. Potensi penerimaan APBD dari Jenis Pendapatan Asli Daerah (terutama pajak dan retribusi) tidak optimal dan Penyerapan APBD tidak maksimal karena dampak kebijakan *Work from Home*

Guna mengatasi permasalahan tersebut di atas, beberapa kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah adalah sebagai berikut.

1. Menerbitkan surat edaran kepada seluruh Dinas Kesehatan Provinsi dan Kab/Kota, Rumah Sakit Rujukan, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), dan Balai Teknik Kesehatan Lingkungan (BTKL), untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi kemungkinan masuknya penyakit ini.

2. Menempatkan 135 *thermal scanner* di seluruh bandar udara di Indonesia terutama yang mempunyai penerbangan langsung dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT).
3. Memberikan *health alert card* dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) pada penumpang.
4. Menunjuk sedikitnya 100 Rumah Sakit Rujukan yang sebelumnya dipakai pada kasus flu burung dan menyiapkan 21 kapsul evakuasi (meja dorong isolasi pasien) sebagai langkah pencegahan.
5. Penundaan penerbangan dari dan ke RRT, pencabutan sementara bebas visa dan *visa on arrival* bagi pemegang passport RRT, dan penghentian sementara impor live animal dari RRT.
6. Menerapkan pembatasan sosial dengan menerapkan skema belajar dari rumah dan pembatalan ujian nasional bagi anak sekolah, dan menghimbau dunia usaha untuk melakukan skema *Work From Home* guna mengurangi kontak secara fisik bagi karyawan dan pelaku usaha.
7. Menunda semua kegiatan terkait dengan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif
8. Pembebasan pajak hotel dan restoran selama 6 bulan dimulai pada tanggal 1 April 2020 sebagai stimulus bagi sektor pariwisata

Sedangkan permasalahan yang dihadapi Provinsi Bali terkait dengan pandemik COVID-19 adalah sebagai berikut:

1. Menurunnya tingkat kunjungan wisatawan akibat pemberlakuan pembatasan pintu masuk melalui pembatasan penerbangan maupun pembatasan penyeberangan laut.
2. Menurunnya PAD Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota akibat ditutupnya kawasan pariwisata dan turunnya jumlah kunjungan pariwisata guna mengurangi penyebaran COVID-19 di Bali.
3. Pertumbuhan ekonomi yang mengalami perlambatan akibat lesunya sektor pariwisata sebagai motor penggerak ekonomi Bali.
4. PHK bagi pekerja di sektor pariwisata akibat penutupan kawasan pariwisata dan penurunan jumlah kunjungan wisatawan.

Ekonomi Bali tahun 2019 tercatat tumbuh 5,63%, melambat dibandingkan pertumbuhan tahun 2018 yang tercatat pada angka

6,33%. Struktur ekonomi Bali dari sisi lapangan usaha pada tahun 2019 masih didominasi oleh Kategori I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) dengan kontribusi sebesar 23,26%. Sementara dari sisi pengeluaran, kontribusi terbesar tercatat pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) yaitu sebesar 47,96%.

Ekonomi Bali triwulan IV-2019 (y-on-y) tercatat tumbuh 5,51% atau mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat tumbuh 7,59%. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Kategori D (Pengadaan Listrik dan Gas) yang tercatat tumbuh 11,95%. Sementara itu bila dilihat dari sisi pengeluaran penunjang utama pertumbuhan ekonomi triwulan IV-2019 yakni Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) tercatat tumbuh sebesar 10,4%.

Secara (q-to-q) atau jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, ekonomi Bali triwulan IV-2019 tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 0,77%. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Kategori D (Pengadaan Listrik dan Gas) yang tercatat tumbuh 9,79%. Sementara itu dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi tercatat pada komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 28,49%.

Berdasarkan data dari Bank Indonesia, Ekonomi Bali pada tahun 2020 diperkirakan akan melambat dibandingkan tahun 2019, akibat kebijakan antisipasi penyebaran virus corona, sementara itu pada tahun 2021 dan 2022 kinerja ekonomi Bali diperkirakan akan mengalami akselerasi. Faktor pendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali tahun 2020 adalah berupa; penambahan *direct flight* internasional, upaya percepatan pengadaan barang dan jasa pemerintah, Pengerjaan Proyek infrastruktur dan konstruksi seperti pelabuhan, bandara, bendungan, dan *shortcut*, Peningkatan produksi pertanian seiring beroperasinya waduk Titab. Sedangkan pada tahun 2021, factor pendorongnya adalah; penambahan *direct flight* internasional, Pengerjaan Proyek infrastruktur dan konstruksi seperti pelabuhan, bandara, bendungan, dan *shortcut*, Membaiknya

kinerja ekonomi negara mitra dagang, dan Pulihnya pariwisata pasca Virus Corona.

Tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Bali dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali berdasarkan paparan pihak Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Tantangan Bidang Pariwisata

- a. Penurunan kualitas pariwisata Bali
- b. Semakin berkembangnya destinasi wisata dunia
- c. Ketergantungan ekonomi Bali pada sektor pariwisata
- d. Eksternalitas negatif pariwisata
- e. Promosi event pariwisata yang belum terintegrasi

2. Tantangan Bidang Infrastruktur

Keterbatasan kapasitas Bandara Ngurah Rai

3. Tantangan Bidang Pertanian

- a. Alih fungsi lahan pertanian
- b. Ketergantungan pasokan dari daerah lain

4. Tantangan Bidang Ekspor

- a. Rendahnya Daya Saing Komoditas Ekspor Bali
- b. Melambatnya Kinerja Ekonomi Negara Mitra Dagang Utama Bali

5. Tantangan Keuangan Daerah

Realisasi Belanja Belum Optimal

Pada bulan Januari 2020 Kota Denpasar tercatat mengalami inflasi setinggi 0,55% sama dengan tingkat inflasi tahun kalender Januari 2020 yang ditunjukkan dengan Indeks Harga Konsumen (IHK 2018=100) sebesar 104,23. Sementara itu, tingkat inflasi tahun ke tahun (Januari 2020 terhadap Januari 2019 atau YoY) tercatat setinggi 2,42%. Peningkatan inflasi ini terutama terjadi pada komponen *volatile food* dan *administered price*. Adapun upaya dan langkah-langkah pengendalian inflasi daerah di Bali dilakukan melalui:

- Peluncuran kegiatan Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) Beras Medium, di Gudang Bulog Batubulan, Gianyar

- Rapat koordinasi penyusunan laporan Tw IV 2018 TPID Kabupaten Badung
- Rapat Koordinasi TPID Kabupaten Karangasem
- Rapat Koordinasi TPID Kabupaten Klungkung
- Pasar Murah, Operasi Pasar, Pemantauan Harga dan Sosialisasi Pengendalian Inflasi sebagai upaya antisipasi tekanan harga periode hari raya Natal, Galungan, dan tahun baru.

Pertumbuhan ekonomi Bali pada tahun 2020 didorong oleh beberapa faktor yang meliputi:

1. Penambahan *direct flight* internasional
2. Upaya percepatan pengadaan barang dan jasa pemerintah,
3. Pengerjaan Proyek infrastruktur dan konstruksi seperti pelabuhan, bandara, bendungan, dan shortcut,
4. Peningkatan produksi pertanian seiring beroperasinya Waduk Titab

Beberapa faktor pendorong kinerja ekonomi Bali Tahun 2021-2022 meliputi:

1. Penambahan *direct flight* internasional
2. Pengerjaan Proyek infrastruktur dan konstruksi seperti pelabuhan, bandara, bendungan, dan *shortcut*
3. Membaiknya kinerja ekonomi negara mitra dagang
4. Pulihnya pariwisata pasca Virus Corona.

Tantangan ekonomi Bali meliputi:

1. Penurunan Kualitas Pariwisata Bali

Kinerja Pariwisata Bali Terus Menunjukkan Perlambatan Jumlah Kunjungan Wisman, sejalan dengan itu Kualitas (*spending*) Wisman juga Menurun. Kualitas wisman mengalami penurunan yang ditunjukkan oleh turunnya *spending* wisman baik berdasarkan data Disparda maupun data Superwisman Bali.

Penurunan kualitas wisman Bali sejalan dengan terus meningkatnya jumlah kunjungan wisman Tiongkok, dengan tingkat *spending* dan *length of stay* (LOS) yang terendah diantara negara utama Wisman Bali.

2. Berkembangnya Destinasi Wisata Dunia

Semakin berkembangnya tujuan destinasi negara lain, mendorong semakin meningkatnya kunjungan wisman ke negara tersebut sehingga Bali perlu terus berbenah, termasuk dalam hal promosi untuk semakin menarik wisman ke Bali.

Beberapa contoh destinasi wisata dunia yang tengah berkembang antara lain: Phuket-Thailand, Nha Trang-Vietnam, Boracay-Filipina, Sabah-Malaysia. Destinasi wisata tersebut memiliki keunggulan seperti misalnya Transportasi dan fasilitas umum yang lebih baik, biaya lebih murah, lebih tenang, dan lingkungan yang lebih alami.

3. Ketergantungan Ekonomi Bali Terhadap Pariwisata

Lapangan Usaha Perdagangan, Hotel, dan Restoran (PHR) mendominasi baik dari sisi kontribusi ekonomi, penyaluran kredit, maupun jumlah tenaga kerja. Pada tahun 2019, penyaluran kredit perbankan sektor pariwisata adalah 42% dan mampu menyerap tenaga kerja sebesar 33%.

Ketergantungan ekonomi Bali pada pariwisata kembali dibuktikan dengan ikut menurunnya pertumbuhan ekonomi Bali ketika pariwisata mengalami dampak baik secara eksternal maupun internal. Contohnya pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi Bali sempat mengalami penurunan dari tahun 2016 akibat erupsi Gunung Agung. Sektor yang paling berdampak dengan meletusnya Gunung Agung adalah Sektor Pariwisata karena mengakibatkan ditutupnya Bandara Ngurah Rai untuk sementara waktu yang berdampak pada menurunnya jumlah kunjungan wisatawan dan tingkat okupansi akomodasi wisata di Bali.

4. Eksternalitas Negatif Pariwisata

Dengan terus meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan, berdampak pada sejumlah eksternalitas negatif seperti kelangkaan air bersih, kemacetan (di Badung Selatan), tingginya harga bahan makanan akibat tingginya permintaan, serta penumpukan sampah.

5. Promosi Event Belum Terintegrasi

Promosi *event* di Bali belum terintegrasi, sebagian dipromosikan dalam *calender of event* Nasional. Bali sendiri belum memiliki *Calender of Event* terintegrasi sendiri.

6. Keterbatasan Kapasitas Bandara Ngurah Rai

Bandara Ngurah Rai saat ini sudah tidak mampu menampung lonjakan penumpang angkutan udara di Bali. Berbagai upaya peningkatan kapasitas bandara yang telah dan sedang dilakukan seperti perluasan apron dan terminal serta perpanjangan runway dan pembuatan *rapid taxi way* hanya mampu meningkatkan kapasitas Bandara Ngurah Rai sampai dengan tahun 2026. Selebihnya, peningkatan kapasitas Bandara Ngurah Rai sudah tidak lagi dimungkinkan sehingga perlu adanya bandara baru di Bali.

7. Terjadinya Alih Fungsi Lahan Pertanian

Alih fungsi lahan pertanian rata-rata di Provinsi Bali diperkirakan adalah seluas 537 Ha/tahun atau 0,67% tiap tahunnya (Berdasarkan paparan BPS Provinsi Bali Tahun 2020). Angka alih fungsi lahan pertanian ini tergolong tinggi karena berada di atas target yaitu 0,5%. Kota Denpasar, Kabupaten Tabanan, dan Kabupaten Buleleng merupakan Kabupaten/Kota yang memiliki rata-rata penurunan luas lahan pertanian di atas 1% tiap tahunnya.

8. Ketergantungan Pasokan Dari Luar

Jumlah wisatawan yang terus meningkat, menjadi salah satu tantangan dalam pengendalian inflasi, seiring dengan terus meningkatnya jumlah wisatawan sehingga mendorong peningkatan permintaan.

9. Daya Saing Ekspor Barang Bali Rendah

Komoditas ekspor Bali memiliki daya saing ekspor yang rendah. Hal ini terlihat dari sebagian besar komoditas ekspor Bali memiliki nilai RCA yang rendah (sekitar 1)

10. Melambatnya Kinerja Ekonomi Negara Mitra Dagang Utama

Kinerja Ekonomi Mitra Dagang Utama Bali Diprakirakan Melambat dan Lemahnya Daya Saing Ekspor Bali.

11. Realisasi Belanja Daerah Terkonsentrasi Pada Triwulan IV

Realisasi keuangan daerah terkonsentrasi pada triwulan IV di setiap tahun, sehingga kontribusi fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi tidak optimal.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Struktur keuangan daerah merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :

- a. Pendapatan Daerah ;
- b. Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan Daerah.

Kebijakan keuangan daerah harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab serta taat pada peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Prinsip pengelolaan ini akan tercermin pada proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan disusun dengan pendekatan kinerja diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara optimal, dengan memperhatikan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan efisiensi, efektivitas, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun

diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan atau kewajaran dalam perpajakan terkait dengan prinsip kewajaran “horisontal” dan kewajaran “vertikal”. Prinsip dari kewajaran horisontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat dalam posisi yang sama harus diberlakukan sama, sedangkan prinsip kewajaran vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak/non pajak (retribusi) untuk membayar, artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula. Tentunya untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional untuk menghilangkan rasa ketidakadilan.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Rincian sumber pendapatan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari:
 - a. Pajak Daerah terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Rokok dan Pemanfaatan Air Permukaan.
 - b. Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terdiri dari Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah, Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada

Perusahaan Patungan/Milik Swasta, dan Bagian Laba Lembaga Keuangan Non Bank.

- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdiri dari Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro, Penerimaan Bunga Deposito, Pendapatan Denda Retribusi, Pendapatan dari Kerjasama Penyelenggaraan Diklat, Pemakaian Barang Milik Daerah, Lain-lain, dan Pendapatan Usaha BLUD.
2. Dana Perimbangan, terdiri dari:
 - a. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak merupakan bagian dana perimbangan untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal (antara Pusat dan Daerah) yang dilakukan melalui pembagian hasil antara Pemerintah Pusat dan Daerah penghasil, dari sebagian penerimaan perpajakan. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Bagi Hasil Sumberdaya Alam
 - b. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana transfer yang bersifat umum (*block grant*) untuk mengatasi masalah ketimpangan horizontal (antar Daerah) dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah. Jumlah DAU setiap daerah propinsi dipengaruhi oleh jumlah keseluruhan DAU untuk daerah propinsi, bobot daerah propinsi yang bersangkutan dan jumlah bobot dari seluruh daerah propinsi.
 - c. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
 3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, terdiri dari:
 - a. Hibah, terdiri dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah, Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri seperti sumbangan dari Dealer/Main Dealer Otomotif, PT Sarihusada dan PT. Jasa Raharja.
 - b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus.

Peningkatan pendapatan daerah diupayakan melalui sumber-sumber pendapatan daerah baik yang bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan maupun lain-lain pendapatan yang sah. Adapun kebijakan yang dapat ditempuh dalam upaya peningkatan pendapatan daerah, yaitu :

1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dilakukan melalui :

Dalam rangka meningkatkan PAD diupayakan melalui kebijakan penataan peraturan daerah di bidang Pendapatan Asli Daerah; intensifikasi; dan ekstensifikasi yaitu sebagai berikut :

a. Penataan Peraturan Daerah di bidang Pendapatan Asli Daerah

Dalam pelaksanaan pemungutan pendapatan asli daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (d/h/ Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah telah ditetapkan Peraturan Daerah) yaitu :

- ✓ Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu.
- ✓ Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- ✓ Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
- ✓ Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

b. Kebijakan intensifikasi dilakukan dengan kegiatan-kegiatan seperti :

- ✓ Menata, mengkaji dan memperbaharui kebijakan sebagai dasar hukum pemungutan dalam bidang Pendapatan Daerah.
 - ✓ Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi produk hukum kepada masyarakat.
 - ✓ Melakukan razia gabungan dengan instansi terkait dan razia dari pintu ke pintu.
 - ✓ Menyempurnakan sistem pemungutan PKB dan BBNKB dengan menerapkan prosedur dan tata laksana pelayanan maupun batasan waktu penyelesaian serta transparansi besaran tarif / biaya sesuai ISO 9001 – 2008 pada UPT Badan Pendapatan Provinsi Bali di Kabupaten/Kota diseluruh Bali.
 - ✓ Mengembangkan sistem pembayaran PKB dan BBNKB melalui sistem Samsat Online dan BUMDES.
 - ✓ Meningkatkan koordinasi dengan Instansi terkait, Pemerintah Pusat serta dengan Provinsi lainnya.
 - ✓ Meningkatkan pembinaan-pembinaan dan pengawasan terhadap UPT Badan Pendapatan Provinsi Bali di Kabupaten/Kota se Bali dan kepada OPD Penghasil.
 - ✓ Melakukan Pengembangan layanan Penerimaan Pajak Asli Daerah Khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) seperti membuka Gerai Samsat, Samsat *Corner*, Samsat Keliling dan Samsat Desa beryadnya
- c. Kebijakan ekstensifikasi, dilakukan dengan kegiatan-kegiatan prioritas sebagai berikut :
- ✓ Mengadakan penjajakan dan pendataan obyek yang akan diangkat;
 - ✓ Membuat kajian-kajian terkait pengembangan potensi obyek pajak dan obyek lainnya;
 - ✓ Mengadakan konsultasi khususnya mengenai potensi komponen-komponen PAD yang bisa dikembangkan; dan
 - ✓ Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka menggali sumber-sumber PAD.

d. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.

2. Peningkatan Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah

Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) juga dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan dana DAK. Sedangkan peningkatan pendapatan dari bagi hasil pajak provinsi dan pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan Bagi Hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. Dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil. Pemerintah Daerah harus mendorong meningkatnya aktivitas perekonomian daerah. Salah satu langkah yang dapat dilaksanakan dalam rangka optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi adalah dengan melauai peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan Kabupaten/Kota dalam mengoptimalkan bagi hasil dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.

Tabel 3.3
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Bali
Tahun 2016 s/d 2021

URAIAN	2016 P	2017 P	2018 P	2019 P	2020	2021
	REALISASI	REALISASI	REALISASI	PROYEKSI	PROYEKSI	PROYEKSI
PENDAPATAN DAERAH	5,249,015,441,333.80	5,992,161,668,458.44	6,259,367,608,393.14	6,498,850,974,403.00	6,605,532,354,231.00	5,309,023,755,578.00
Pendapatan Asli Daerah	3,041,192,945,534.15	3,398,472,278,306.41	3,718,499,635,346.14	3,762,785,679,903.00	3,762,474,904,231.00	3,800,043,005,820.00
Pajak Daerah	2,593,093,540,850.00	2,872,354,212,630.00	3,230,732,169,802.50	3,235,176,956,048.00	3,264,953,502,659.00	3,292,482,481,000.00
Retribusi Daerah	63,858,566,092.00	46,431,881,689.84	40,241,780,029.00	49,803,474,650.00	49,186,364,327.00	30,774,558,950.00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	172,408,361,957.52	188,456,139,544.28	170,219,137,368.48	170,885,580,850.00	166,229,110,770.00	144,305,193,850.00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah	211,832,476,634.63	291,230,044,442.29	277,306,548,146.16	306,919,668,355.00	282,105,926,475.00	332,480,772,020.00
Dana Perimbangan	1,867,010,930,284.00	2,535,995,754,659.00	2,493,979,973,047.00	2,662,026,888,500.00	2,786,820,608,000.00	1,503,592,749,758.00
Dana Bagi Hasil ajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	171,994,343,152.00	169,597,184,795.00	182,554,549,512.00	185,994,009,500.00	150,459,921,000.00	159,561,430,758.00
Dana Alokasi Umum	850,144,224,000.00	1,260,842,523,000.00	1,268,585,388,000.00	1,325,847,555,000.00	1,344,031,319,000.00	1,344,031,319,000.00

URAIAN	2016 P	2017 P	2018 P	2019 P	2020	2021
	REALISASI	REALISASI	REALISASI	PROYEKSI	PROYEKSI	PROYEKSI
Dana Alokasi Khusus	844,872,363,132.00	1,105,556,046,864.00	1,042,840,035,535.00	1,150,185,324,000.00	1,292,329,368,000.00	0.00
Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	340,811,565,515.65	57,693,635,493.03	46,888,000,000.00	74,038,406,000.00	56,236,842,000.00	5,388,000,000.00
Pendapatan Hibah	4,890,000,000.00	15,654,526,300.77	5,388,000,000.00	5,604,000,000.00	5,388,000,000.00	5,388,000,000.00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	5,000,000,000.00	7,500,000,000.00	41,500,000,000.00	68,434,406,000.00	0.00	0.00
Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	330,921,565,515.65	34,539,109,192.26	0.00	0.00	0.00	0.00
Sumbangan Pihak Ketiga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alokasi Kurang Bayar DAK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sumber : Realisasi APBD 2016, 2017, 2018, dan Proyeksi APBD 2019, 2020, dan Proyeksi RKPD 2021

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Untuk itu, kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistimatis dan terpola. Belanja daerah pada Tahun 2021 diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan. Belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Belanja harus diarahkan untuk mendukung

kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi), dimana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat (hasil).

Selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

1. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.
2. Prioritas Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, budaya, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan. Khusus untuk belanja bidang Pendidikan, mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 49, yo. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2706/SJ Tanggal 8 September 2008, bahwa Belanja Pendidikan dialokasikan sebesar 20% dari Total Belanja Daerah. Besaran alokasi dana pendidikan 20% tersebut termasuk Belanja Gaji PNS Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Untuk anggaran Kesehatan sesuai dengan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada pasal 171 ayat (2) menyebutkan bahwa alokasi anggaran kesehatan minimal sebesar 10% dari APBD diluar Gaji.
3. Optimalisasi belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

4. Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga, sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Transparansi dan Akuntabel Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil.

Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pada masing-masing pemerintah daerah; dan klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Sementara menurut kelompok belanja, belanja dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Belanja Tidak Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari: Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Belanja Tidak Terduga; dan
2. Belanja Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang dianggarkan pada belanja Perangkat Daerah berkenaan, terdiri dari : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal.

Tabel 3.4
Realisasi dan Proyeksi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung
Provinsi Bali Tahun 2016 s/d Tahun 2021

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	REALISASI	REALISASI	REALISASI	PROYEKSI	PROYEKSI	PROYEKSI
BELANJA DAERAH	5,420,935,912,566.53	6,070,536,923,735.28	5,998,547,032,281.81	7,201,196,359,769.47	7,280,707,083,216.00	6,220,369,043,566.00
Belanja Tidak Langsung	3,857,591,080,125.33	4,348,259,186,136.59	4,495,096,869,911.27	4,960,823,190,882.47	4,482,234,035,829.00	3,555,347,712,340.00
Belanja Pegawai	753,995,649,371.00	1,493,989,761,722.94	1,571,381,339,168.00	1,673,097,219,437.27	1,702,836,432,572.00	1,487,468,362,600.00
Belanja Bunga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Subsidi	9,990,000,000.00	10,000,000,000.00	9,566,400,000.00	10,000,000,000.00	0.00	0.00
Belanja Hibah	1,116,809,328,526.00	1,122,239,172,548.00	1,072,780,454,888.96	1,065,541,042,600.00	1,023,113,875,000.00	295,994,400,000.00
Belanja Bantuan Sosial	155,774,827,000.00	11,143,000,000.00	3,189,000,000.00	4,220,000,000.00	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
Belanja bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	1,026,250,937,576.02	1,098,555,278,556.60	1,207,451,785,444.09	1,339,553,585,283.20	1,240,356,833,217.00	1,255,958,054,700.00
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik	794,578,160,468.85	612,177,419,409.05	630,540,390,410.22	856,313,067,054.00	496,926,895,040.00	496,926,895,040.00
Belanja Tidak Terduga	192,177,183.46	154,553,900.00	187,500,000.00	12,098,276,508.00	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00
Belanja Langsung	1,563,344,832,441.20	1,722,277,737,598.69	1,503,450,162,370.54	2,240,373,168,887.00	2,798,473,047,387.00	2,665,021,331,226.00
Belanja Pegawai	96,558,764,493.00	13,311,657,356.00	19,056,178,494.00	26,560,930,404.00	34,831,413,231.00	
Belanja Barang dan Jasa	735,861,830,573.66	1,048,533,246,877.49	1,043,683,821,530.14	1,439,077,715,343.00	1,899,010,113,299.00	
Belanja Modal	730,924,237,374.54	660,432,833,365.20	440,710,162,346.40	760,471,523,140.00	864,631,520,857.00	
Surplus / (Defisit)	(171,920,471,232.73)	(78,375,255,276.84)	260,820,576,111.33	(702,345,385,366.47)	(675,174,728,985.00)	(911,345,287,988.00)

Sumber : Realisasi APBD 2016, 2017, 2018, dan Proyeksi APBD 2019, 2020, dan Proyeksi RKPD 2021

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan beban. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah. Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah dalam hal terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari.

1. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA) mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan pelampauan penerimaan lain-lain

pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

2. Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan, dengan Jumlah yang dianggarkan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan berkenaan. Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dianggarkan dalam belanja langsung Perangkat Daerah pengguna dana cadangan berkenaan, kecuali diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.
3. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan digunakan antara lain untuk menganggarkan hasil penjualan perusahaan milik daerah/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.
4. Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.
5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.
6. Penerimaan piutang digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang pihak ketiga, seperti berupa penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah, pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan penerimaan piutang lainnya.

Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan dapat berupa Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal Daerah, Pembayaran Utang Pokok serta Pemberian pinjaman daerah.

1. Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan yang ditetapkan dengan peraturan daerah, guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. Peraturan daerah tersebut mencakup penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. Dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari dana alokasi khusus, pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan; ditempatkan pada rekening tersendiri. Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan.
2. Penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
3. Pembayaran pokok utang digunakan untuk menganggarkan pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Tabel 3.5
Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Bali
Tahun 2016 s/d 2021

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	REALISASI	REALISASI	REALISASI	PROYEKSI	PROYEKSI	PROYEKSI
PEMBIAYAAN DAERAH	624,677,370,022.76	486,687,088,163.58	441,524,809,255.14	702,345,385,366.47	675,174,728,985.00	911,345,287,988.00
Penerimaan Pembiayaan	674,677,370,022.76	486,687,088,163.58	441,914,809,255.14	702,345,385,366.47	755,174,728,985.00	911,345,287,988.00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	674,677,370,022.76	452,761,594,975.09	404,137,168,978.49	702,345,385,366.47	755,174,728,985,00	911,345,287,988.00
Pencairan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	REALISASI	REALISASI	REALISASI	PROYEKSI	PROYEKSI	PROYEKSI
Penerimaan Pembiayaan Lainnya	0.00	33,925,493,188.49	37,777,640,276.65	0.00	0.00	0.00
Pengeluaran Pembiayaan	50,000,000,000.00	0.00	390,000,000.00	0.00	80,000,000,000.00	0.00
Pembentukan Dana Cadangan	50,000,000,000.00	0.00	390,000,000.00	0.00	0.00	0.00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000,000,000.00	0.00
Penguatan Modal Pemerintah Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	452,756,898,790.03	408,311,832,886.74	702,345,385,366.47	0.00	0.00	0.00

Sumber : Realisasi APBD 2016, 2017, 2018, dan Proyeksi APBD 2019, 2020, dan Proyeksi RKPD 2021

3.3 Konversi Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

Dengan telah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan telah berlaku sejak diundangkan, maka struktur proyeksi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2021 dikonversikan berdasarkan struktur yang tercantum dalam peraturan pemerintah tersebut. Adapun konversi Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah sebagai berikut

Tabel 3.6
Konversi Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021

NO	URAIAN	PROYEKSI 2021
1	2	3
1	PENDAPATAN DAERAH	5.309.023.755.578,00
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	3.800.043.005.820,00
1.1.1.	Pajak Daerah	3.292.482.481.000,00
1.1.2.	Retribusi Daerah	30.774.558.950,00
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	144.305.193.850,00
1.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	332.480.772.020,00
1.2.	PENDAPATAN TRANSFER	1.503.592.749.758,00
1.2.1.	Transfer Pemerintah Pusat	1.503.592.749.758,00
1.2.2.	Transfer Antar Daerah	0,00

NO	URAIAN	PROYEKSI 2021
1	2	3
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	5.388.000.000,00
1.3.1.	Hibah	5.388.000.000,00
1.3.3.	Dana Darurat	0,00
1.3.4.	Lain-lain Pendapatan Sesuai PUU	0,00
2.	BELANJA DAERAH	6.220.369.043.566,00
2.1.	Belanja Operasional	3.896.405.232.061,00
2.1.1	Belanja Pegawai	1.487.468.362.600,00
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.251.975.244.755,00
2.1.2.	Belanja Bunga	0,00
2.1.3.	Belanja Subsidi	0,00
2.1.4.	Belanja Hibah	295.994.400.000,00
2.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	4.000.000.000,00
2.2	Belanja Modal	413.046.086.471,00
2.2.1	Belanja Modal Tanah	75.000.000.000,00
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.910.000.000,00
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	226.595.000.000,00
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	107.808.830.071,00
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.732.256.400,00
2.3	Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000,00
2.4	Belanja Transfer	1.752.884.949.740,00
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	1.255.958.054.700,00
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	496.926.895.040,00
	Surplus / (Defisit)	-911.345.287.988,00
3.	PEMBIAYAAN DAERAH	911.345.287.988,00
3.1	Penerimaan Pembiayaan	911.345.287.988,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	911.345.287.988,00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00
3.1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai Ketentuan PUU	0,00

NO	URAIAN	PROYEKSI 2021
1	2	3
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal Daerah	0,00
3.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00
3.2.5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai PUU	0,00